



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD SYAUKANI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 129936

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

3.964.500.000

1. Tanah Seluas 1402 m2 di BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 841.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m2/110 m2 di KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 465.500.000
3. Tanah Seluas 3291 m2 di BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/108 m2 di KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
5. Tanah Seluas 3752 m2 di BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 938.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

226.000.000

1. MOBIL, KIA PICANTO MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, KIA PICANTO MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

160.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

35.758.669



F. HARTA LAINNYA	Rp.	2.000.000
Sub Total	Rp.	4.388.258.669
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.388.258.669

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.